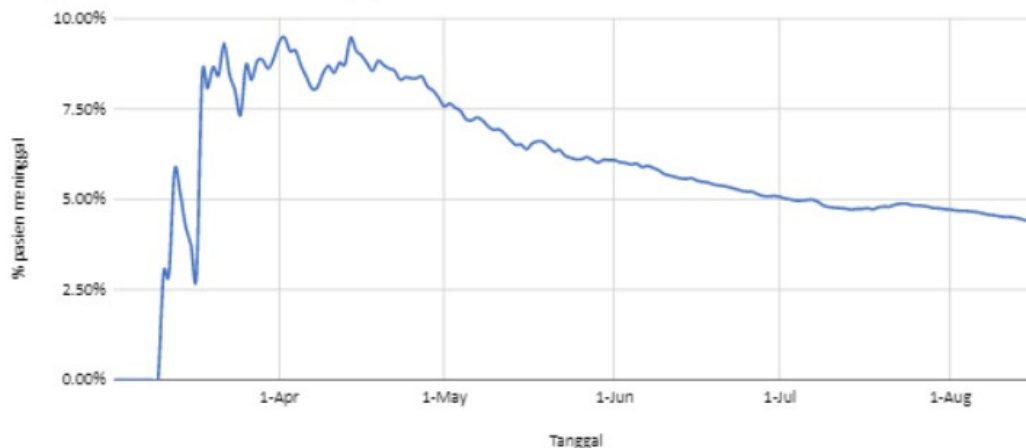


Pada Tanggal 18 Agustus, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan 141,370 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di semua provinsi di Indonesia, dengan 6,207 kematian. Pemerintah juga telah mengumumkan bahwa 94,458 orang telah pulih dari penyakit. Saat ini persentase kematian yang disebabkan COVID-19 dibandingkan dengan kasus dikonfirmasi adalah 4,39 persen. Gambar berikut ini menunjukkan kecenderungan yang menurun dari persentase kematian harian karena COVID-19 dengan jumlah kasus dikonfirmasi harian, sejak pertengahan April 2020:

Tingkat kematian COVID-19 (%) di Indonesia



Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Tanggal 4 Agustus. Peraturan ini untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia. Selain instruksi kepada para pimpinan Kementerian dan Lembaga Pemerintah, Presiden meminta para Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melakukan sosialisasi masif tentang protokol kesehatan dan mengenakan sanksi bagi yang tidak menaatinya.

Per Tanggal 6 Agustus, Menteri Keuangan memaparkan realisasi dana penanganan pandemi COVID-19 baru sebesar Rp. 151,25 triliun (21,75 persen dari total alokasi Rp. 695,2 triliun). Mayoritas penyerapan berada di bidang perlindungan atau bantuan sosial yang sebesar Rp. 86,5 triliun (48,8 persen dari alokasi Rp. 203,91 triliun), yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sembako Jabodetabek, Bantuan Tunai Non-Jabodetabek, Program Kartu Prakerja, diskon listrik, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Menarik untuk dicatat bahwa PT Angkasa Pura II mencatat 524 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta di Tanggal 14 Agustus (43,6 persen dari 1.200 penerbangan - kapasitas harian yang ditentukan), dengan 45.745 penumpang. Hal ini merupakan jumlah penerbangan dan penumpang harian tertinggi selama pandemic COVID-19. Sebagai perbandingan, rata-rata 100 penerbangan/hari di Bulan Mei; dan 300 penerbangan/hari di Bulan Juli.

Pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 melalui berbagai skema. Menteri Ketenagakerjaan mengumumkan bahwa bantuan bagi pekerja swasta dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan di bawah Rp. 5 juta per bulan dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan akan mulai disalurkan pada 25 Agustus. Subsidi upah yang diberikan sebesar Rp. 600 ribu selama 4 bulan atau total senilai Rp. 2,4 juta. Subsidi ini akan diberikan setiap dua bulan atau setiap pembayaran sebesar Rp. 1,2 juta. Sebanyak 12 juta rekening pekerja calon penerima bantuan telah disiapkan dari data BPJS Ketenagakerjaan. Skema bantuan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 37 triliun.

Kementerian Agama telah mendata 21.173 pesantren yang akan menerima bantuan (2.235 pesantren besar, dengan memilik santri di atas 1.500 orang akan menerima bantuan sebesar Rp. 50 juta, 4.032 pesantren sedang mendapat Rp. 40 juta dan 14.906 pesantren dengan kategori kecil mendapat bantuan sebesar Rp. 25 juta). Selain itu, 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) dan 112.008 Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPQ) masing-masing akan mendapat Rp. 10 juta. Lembaga penerima bantuan akan mendapat Surat Pemberitahuan dari Kementerian Agama dan perlu menyerahkan bukti Izin Operasional, NPWP dan Kepengurusan Lembaga sebagai syarat pencairannya melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan bantuan senilai Rp. 2,59 triliun untuk membantu pondok pesantren yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan ini dalam bentuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) senilai Rp. 2,38 triliun dan bantuan pembelajaran daring sejumlah Rp. 211,73 miliar.

DKI Jakarta telah memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya transisi menuju Adaptasi Kebiasaan Baru hingga 27 Agustus. Hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan termasuk *positivity rate* COVID-19 yang telah meningkat di angka 8,7 persen. Gubernur DKI Jakarta juga memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas sosial yang menyebabkan kerumunan termasuk Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau car free day.

Rapat Koordinasi Kolaborasi Multi Pihak Dalam Penanganan Respons Covid-19 pada Tanggal: 4 Agustus dipimpin oleh Kementerian Koordinasi bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan diikuti oleh Kantor Staf Presiden, BNPB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BASARNAS dan POLRI, serta mitra Klaster Nasional Penanggulangan Bencana. Pada pertemuan tersebut dilaporkan nilai dukungan pendanaan melalui kolaborasi multi pihak non pemerintah per 31 Juli 2020 sebesar lebih dari US\$ 200 juta. Kesepakatan dan tindak lanjut utama yang akan dilakukan meliputi:

- 1) Kemenko PMK akan mendorong sinergi kementerian/Lembaga untuk tindak lanjut usulan yang disampaikan mitra klaster/sub-klaster/pokja, HFI, Forum PRB DI Yogyakarta dan NTT, serta SEJAJAR.
- 2) Diseminasikan laporan mingguan kolaborasi multi pihak dari Kemenko PMK kepada kementerian/Lembaga yang menjadi koordinator/wakil koordinator klaster nasional penanggulangan bencana untuk menjadi pertimbangan kebijakan dan tindakan yang diperlukan.
- 3) Pertemuan koordinasi Klaster Kesehatan secara regular untuk membangun sinergi mengadakan rapat koordinasi berikutnya dengan mengundang seluruh Kementerian/Lembaga terkait dalam kolaborasi multi pihak dalam bidang kesehatan.
- 4) Kemenko PMK akan mendorong diskusi kementerian/Lembaga bersama SOPS POLRI untuk menyusun strategi pengamanan PILKADA.
- 5) Pembentukan satu tim kecil untuk menyusun policy brief yang menjadi masukan bagi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berikut ini adalah sorotan utama dari klaster Nasional Penanggulangan Bencana dan bidang-bidang prioritas selama dua minggu terakhir:

Kesehatan: telah dilakukan sensitisasi Pedoman Layanan Kontrasepsi pada Situasi Krisis Kesehatan kepada seluruh mitra terkait di seluruh Provinsi pada 28-30 Juli oleh BKKBN dan UNFPA); dalam penanganan dampak bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, sub klaster kesehatan reproduksi dibawah koordinasi Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan telah mendistribusikan 50 kit hygiene, 20 kit Ibu hamil, 20 kit Ibu melahirkan, 30 Kit bayi baru lahir, dan 5 kit Lansia.

Logistik: Hasil pemetaan kapasitas produsen lokal terkait Alat Pelindung Diri dan alat kesehatan telah disampaikan kepada Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, BNPB dan para anggota Klaster Logistik Nasional; penetapan Definisi, Daftar dan Prioritas Barang Penting Komersial di masa Pandemi COVID-19 di Indonesia sedang dibahas.

Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian: Pelatihan bagi pemerintah daerah dan LSM setempat pada penanganan kemanusiaan terhadap imigran Rohingnya di Aceh dilakukan pada 5 – 7 Agustus; dibawah pimpinan Kementerian Sosial, penyusunan Kerangka Acuan Kerja Pembuatan multi sektoral E – Learning Platform, Rencana Kerja, Buku manual dan information kit untuk peningkatan kapasitas dan kinerja TAGANA sedang dilakukan.

Pendidikan: Kementerian Agama telah menyetujui beberapa topik prioritas untuk webinar Guru-guru Raudlatul Athfal yang akan dimulai tanggal 19 Agustus; panduan belajar dari rumah untuk anak dengan disabilitas sedang dibuat; dilakukan diskusi bersama Kementerian Desa tentang penggunaan dana desa untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh.

Air, Sanitasi dan Higiene: Protokol Pemicuan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada Situasi Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 telah dikeluarkan oleh Kementerian kesehatan, dan agar dapat digunakan termasuk dalam pengelolaan pengungsian. Diharapkan protokol ini dapat disosialisasikan dan dipantau melalui Satuan tugas, BNPB dan Kementerian Sosail serta mitranya.

Pemulihan Dini: Di sektor usaha dan UMKM, tengah dilakukan lima seri lokakarya mengenai bisnis saat Adaptasi Kebiasaan Baru; 24 kegiatan pelatihan dan advokasi mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas telah dilakukan di enam kota; sedang dilaksanakan kajian sosial ekonomi dan dampak pandemi COVID-19 di Sulawesi Tengah dan NTB bagi rumah tangga yang belum pulih sepenuhnya akibat gempa bumi tahun 2018.

Saat ini terdapat 262 lembaga non-pemerintah dengan lebih dari 3.000 kegiatan yang tercatat dalam 3W - siapa melakukan apa di mana - sampai saat ini. Bidang kegiatan yang paling banyak meliputi kesehatan, air, sanitasi dan higiene dan kesehatan reproduksi, sedangkan wilayah geografis dengan jumlah kegiatan terbanyak adalah di DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Data dapat dilaporkan melalui salah satu dari tiga format berikut: Kobo Toolbox, Google form atau MS Excel, pada tautan berikut:

KoBo Toolbox:

<https://bit.ly/BersatuLawanCovid19> (Bahasa Indonesia)

https://bit.ly/BersatuLawanCovid19_EN (Bahasa Inggris)

Google form:

https://bit.ly/BersatuLawanCovid19_GoogleForm (Bahasa Indonesia)

https://bit.ly/COVID-19_Googleform_EN (Bahasa Inggris)

MS Excel:

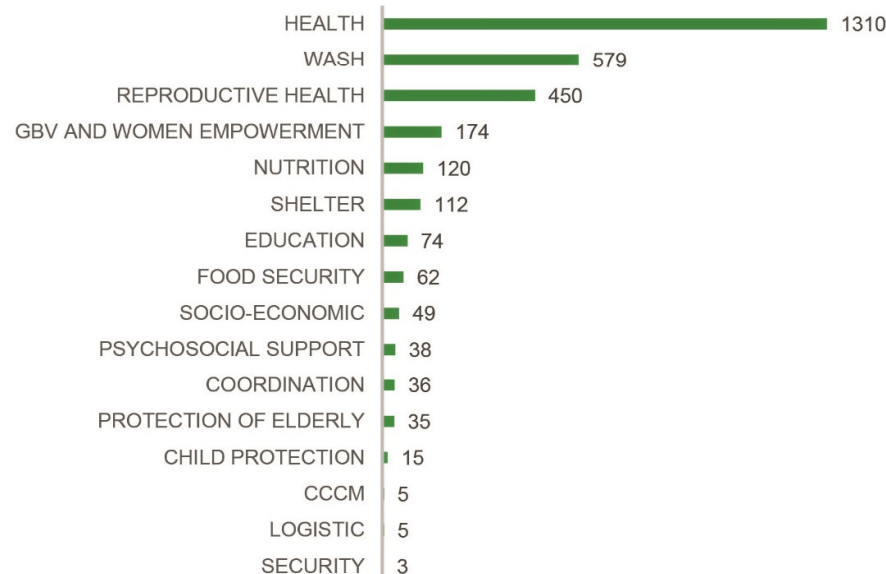
https://bit.ly/3W_COVID19_Excel

Untuk informasi lebih lanjut tentang 3W, silakan hubungi Rifkianto Aribowo di rifkianto.aribowo@un.org.

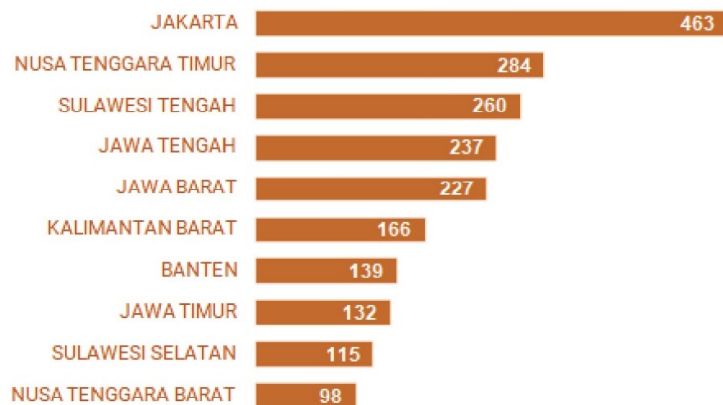
262 ORGANIZATIONS



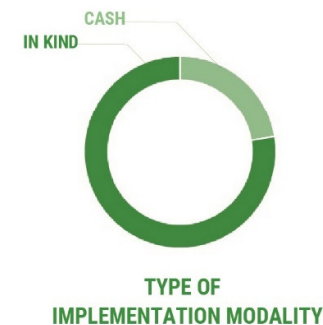
3077 ACTIVITIES



NUMBER OF ACTIVITIES IN TOP TEN PROVINCES



34 PROVINCES



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.
 Creation date: 15 August 2020 Sources: COVID-19 3W in Indonesia Feedback: rifikianto.aribowo@un.org www.unocha.org https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/indonesia